



PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

2013



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 2013.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2013. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo dalam periode tahun 2011-2016. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, Januari 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610801 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, LAKIP Tahun 2013 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a) mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016 adalah: 1) meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah sesuai dengan target, yaitu sebesar 81,83%.
- b. indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah sesuai dengan target, yaitu sebesar 78,69%.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Struktur Organisasi | 2 |
| I.3 Tugas dan Fungsi | 4 |
| I.4 Potensi | 7 |
| I.4.1 Susunan Kepegawaian | 7 |
| I.4.2 Keadaan Sarana dan Prasarana | 9 |
| I.4.3 Keuangan | 10 |
| I.5 Sistematika LAKIP | 10 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 11 |
| II.1 Perencanaan Strategis | 11 |
| II.1.1 Visi dan Misi | 11 |
| II.1.2 Tujuan dan Sasaran | 13 |
| II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan | 14 |
| II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 16 |
| II.2 Penetapan Kinerja | 16 |
| II.3 Rencana Anggaran | 18 |
| II.3.1 Target Belanja Bappeda Kulon Progo | 18 |
| II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 | 21 |
| III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 21 |
| III.2.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan | 21 |
| III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 23 |
| III.3 Akuntabilitas Anggaran | 25 |
| BAB IV PENUTUP | 27 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Pangkat | 8 |
| Tabel 1.2 Kondisi Aset Bappeda Tahun 2013 | 9 |
| Tabel 2.1 Tujuan untuk mencapai misi | 13 |
| Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kulon Progo Tahun 2012-2016 | 14 |
| Tabel 2.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan | 14 |
| Tabel 2.4 Rencana Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2013 | 16 |
| Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2013 | 16 |
| Tabel 2.6 Target Belanja Bappeda Kulon Progo Tahun 2013 | 19 |
| Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis | 19 |
| Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 | 21 |
| Tabel 3.2 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2013 | 22 |
| Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2013 | 23 |
| Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2013 | 25 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo | 3 |
| Gambar 1.2 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin | 8 |
| Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 8 |
| Gambar 1.4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja | 9 |
| Gambar 2.1 Musrenbang RKPd sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan | 13 |
| Gambar 3.1 Halaman depan website Bappeda Kulon Progo | 23 |
| Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo | 24 |

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Bappeda Kulon Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang dan statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Bappeda Kulon Progo yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian dan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan Bappeda Kulon Progo dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk

pengendalian program kegiatan, perbaikan *input*, proses dan *output* maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

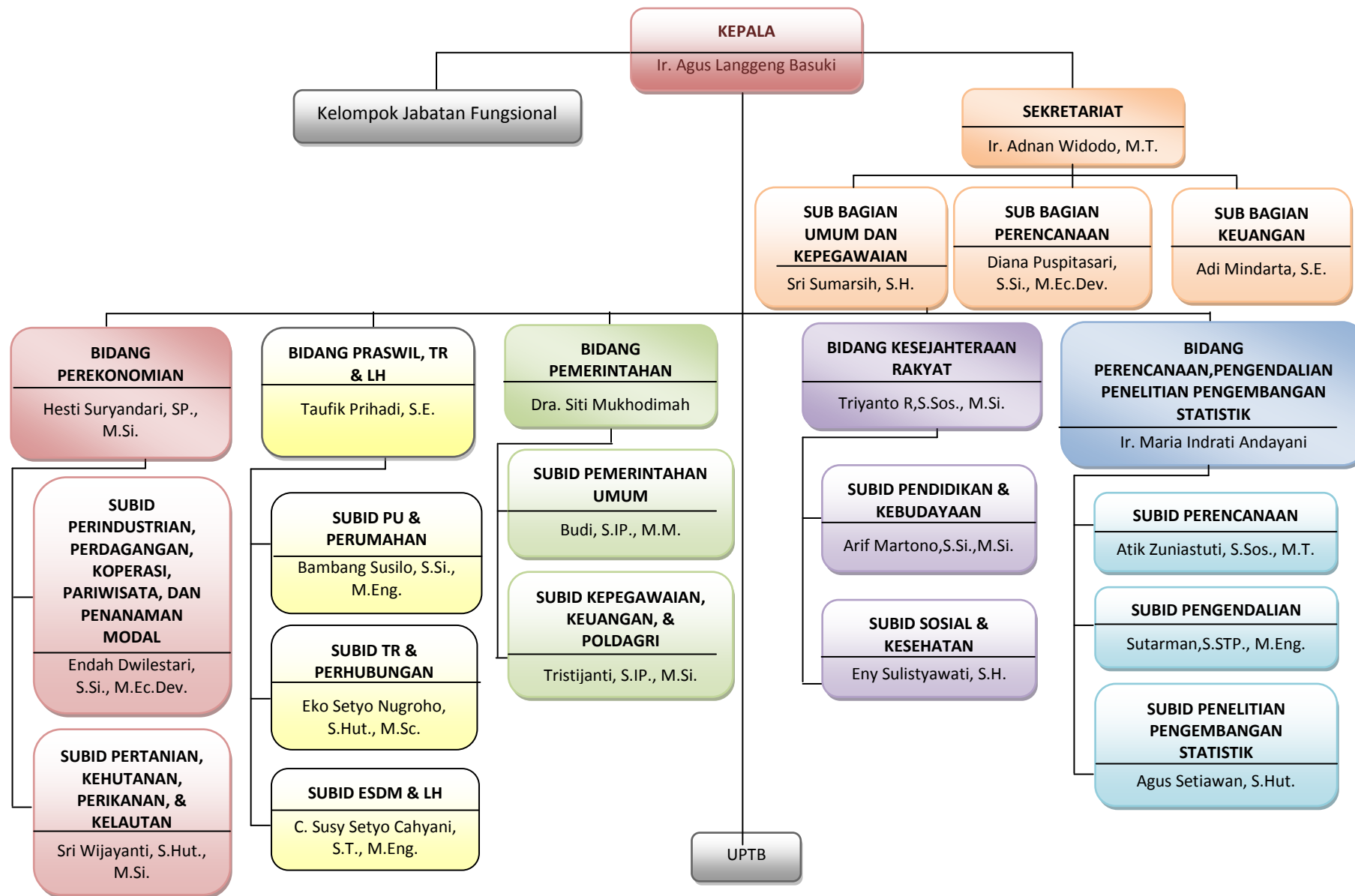
I.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perindustrian Perdag. Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal
 - 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan
- d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan
 - 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum
 - 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri
- f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
- g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik
 - 1) Sub Bidang Perencanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian; dan
 - 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik
- h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

I.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. Menyusun perencanaan pemerintahan;
- d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan
- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, dan penanaman modal.

b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan.

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan penataan ruang.

c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

4. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan perizinan terpadu.

a. Sub Bidang Pemerintahan Umum

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu.

b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan.

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan.

b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

Sub Bidang Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa.

6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik.

a. Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

b. Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan statistik.

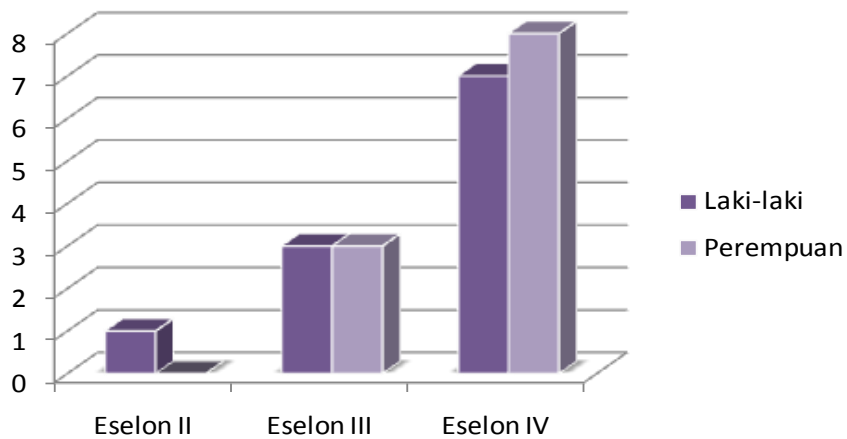
I.4 POTENSI

I.4.1 Susunan Kepegawaian

I.4.1.1 Kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin

a. Pejabat Struktural

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender jabatan struktural Bappeda yang dijelaskan gambar berikut:



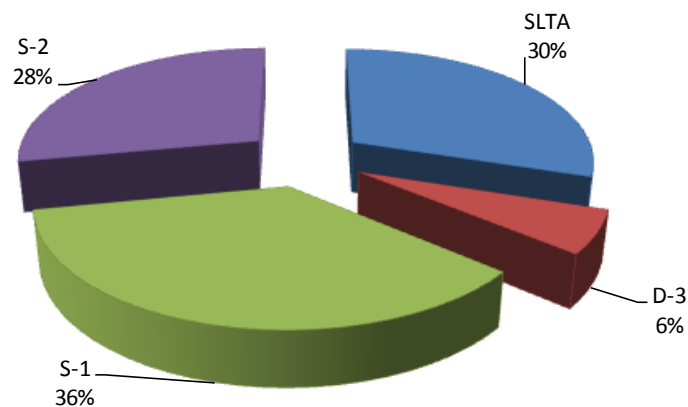
Gambar 1.2
Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Golongan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo
menurut Golongan Pangkat

| Unit | Gol.II | Gol.III | Gol.IV | Jumlah |
|---|--------|---------|--------|--------|
| Kepala | - | - | 1 | 1 |
| Sekretariat | 4 | 10 | 1 | 15 |
| Bidang Perekonomian | - | 3 | 3 | 6 |
| Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan LH | - | 6 | 1 | 7 |
| Bidang Kesejahteraan Rakyat | - | 4 | 2 | 6 |
| Bidang Pemerintahan | - | 3 | 2 | 5 |
| Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik | - | 10 | 2 | 12 |
| Jumlah | 4 | 36 | 12 | 52 |

c. Pendidikan

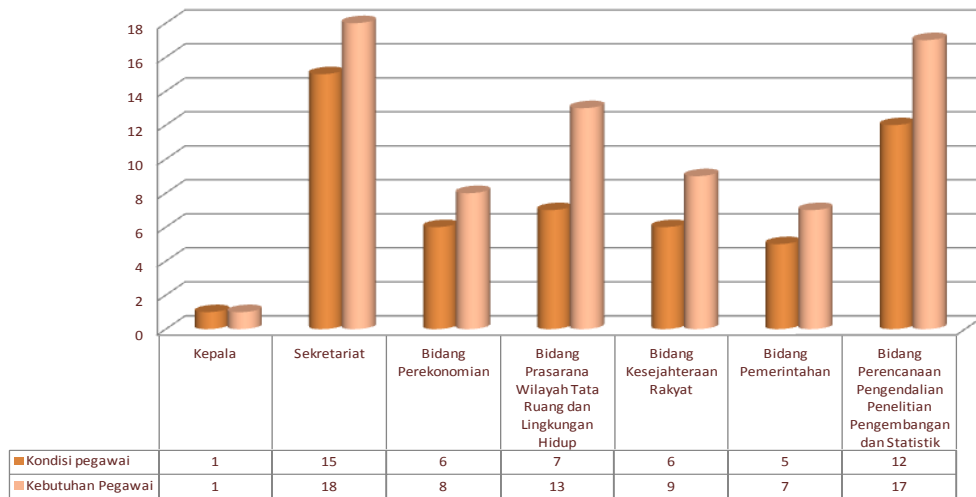


Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (18 orang atau 36%), diikuti oleh pendidikan SLTA (15 orang atau 30%), pendidikan S-2 (14 orang atau 28%) dan D-3 (3 orang atau 6%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo kurang memadai dalam segi kuantitas, namun cukup memadai dalam segi kualitas.

I.4.1.2 Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi kebutuhan pegawai Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:



Gambar 1.5
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

I.4.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Aset Bappeda Tahun 2013

| No. | Jenis Aset | Jumlah (unit) | Kondisi Baik | % |
|-----|------------------------|---------------|--------------|-------|
| 1 | Gedung 2 lantai | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Kendaraan Dinas roda 4 | 3 | 3 | 100 |
| 3 | Kendaraan Dinas roda 2 | 11 | 8 | 72,73 |

| No. | Jenis Aset | Jumlah (unit) | Kondisi Baik | % |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4 | Wireless | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mesin Ketik | 8 | 8 | 100 |
| 6 | Telepon | 2 | 2 | 100 |
| 7 | Laptop | 21 | 17 | 80,95 |
| 8 | Komputer | 16 | 16 | 100 |
| 9 | Proyektor LCD | 2 | 2 | 100 |
| 10 | Ruang Rapat | 2 | 2 | 100 |
| 11 | AC | 11 | 11 | 100 |
| 12 | TV | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Kamera | 3 | 2 | 66,7 |
| 14 | Sound system | 1 | 1 | 100 |
| 15 | Aset lainnya | 397 | 392 | 98,74 |
| JUMLAH | | 480 | 466 | 97,05 |

I.4.3 Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kulon sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2013 Bappeda Kulon Progo mengelola anggaran sebesar Rp.6.279.181.389,00 terdiri belanja langsung sebesar Rp.3.468.725.405,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.810.455.984,00.

I.5 SISTEMATIKA LAKIP

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kulon Progo, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan Sistematika penulisan LAKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja.

II.1.1 Visi dan Misi

Dengan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Baik untuk Mencapai Kulon Progo yang Sehat, Mandiri, Berprestasi, Adil, Aman dan Sejahtera”

Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

- Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan.

- Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif, realistis, luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti mendasarkan pemikiran yang objektif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.
- Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan



Gambar 2.1
Musrenbang RKPD sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

II.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan untuk mencapai misi

| No. | Misi | Tujuan |
|-----|--|---|
| 1 | Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif | Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan. |
| 2 | Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan | Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang. |

II.1.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi,

misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kulon Progo Tahun 2012-2016

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) | | | | |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan | Meningkatnya kinerja perencanaan | Capaian kinerja program (%) | 83,70 | 81,83 | 84,00 | 87,00 | 90,00 |
| 2 | Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 70,43 | 78,69 | 79,47 | 80,27 | 81,07 |

II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Strategi dan kebijakan Bappeda Kulon Progo di tahun 2013 dalam setiap misinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

| MISI I : Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif | | |
|--|--|---|
| Strategi | Kebijakan | Program dan Kegiatan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan • Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam statistik daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan sistem perencanaan terpadu • Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu • Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerjasama Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD; c. Penyusunan Strategi Pengembangan Kota; d. Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah); e. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD); |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>f. <i>Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah;</i></p> <p>g. <i>Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</i></p> <p>h. <i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;</i></p> <p>i. <i>Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;</i></p> <p>j. <i>Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;</i></p> <p>k. <i>Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;</i></p> <p>l. <i>Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah;</i></p> <p>m. <i>Penyusunan Data Dasar Spasial;</i></p> <p>n. <i>Penyusunan RPJMD;</i></p> <p>o. <i>Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs.</i></p> <p>3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi:</p> <p>a. <i>Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;</i></p> <p>b. <i>Penyusunan Database Daerah;</i></p> <p>c. <i>Penyusunan Data Keluarga Miskin.</i></p> |
|--|--|--|

MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

| Strategi | Kebijakan | Program dan Kegiatan |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan. • Meningkatkan kualitas rencana tata ruang • Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kelembagaan penataan ruang • Meningkatkan kualitas produk perencanaan ruang • Mendorong percepatan penetapan produk perencanaan ruang dalam bentuk perda, sehingga bisa lebih aplikatif • Meningkatkan kualitas koordinasi penataan ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Tata Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan</i> 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Koordinasi Pemanfaatan Ruang</i> |

II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2013 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana strategis Bappeda. Berdasarkan APBD tahun 2013 disusun Rencana Kinerja Bappeda sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Bappeda Kulon Progo
Tahun 2013

| No. | Sasaran | Indikator | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya kinerja perencanaan | Capaian kinerja program | 81,83% |
| 2 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 78,69% |

II.2 PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan rencana kerja tahun 2013 Bappeda telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah penetapan kinerja Bappeda tahun 2013 sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Bappeda Kulon Progo
Tahun 2013

| Sasaran | Indikator | Target | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|---|-------------------------|--------|--|--------------------|
| Meningkatnya kinerja perencanaan | Capaian kinerja program | 81,83% | Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah | 251.089.650 |
| | | | Penyusunan database daerah | 87.625.000 |
| | | | Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik | 163.464.650 |
| | | | Program Kerjasama Pembangunan Daerah | 78.099.880 |

| Sasaran | Indikator | Target | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
|--|---|--------|--|--------------------|
| Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 78,69% | Program Perencanaan Tata Ruang | 593.800.000 |
| | | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan | 593.800.000 |
| | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 53.665.000 |
| | | | Koordinasi Pemanfaatan Ruang | 53.665.000 |

II.3 RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2013 Bappeda Kulon Progo melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp.5.553.817.644,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.2.697.573.755,00 dan belanja tidak langsung 2.856.243.889,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2013, anggaran Bappeda Kulon Progo menjadi Rp.6.279.181.389,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.3.468.725.405,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.810.455.984,00.

Total Realisasi APBD tahun 2013 setelah perubahan sebesar Rp.5.567.857.064,00 (88,67%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 2.681.209.995,00 (48,15%) belanja langsung sebesar Rp 2.886.742.069 (51,85%).

II.3.1 Target Belanja Bappeda Kulon Progo

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappeda Kulon Progo menetapkan target belanja sebesar Rp.6.279.181.389,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.810.455.984,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.468.725.405,00. Semua anggaran berasal dari dana APBD Kabupaten.

Tabel 2.6
Target Belanja Bappeda Kulon Progo Tahun 2013

| Uraian | Target | Persentase |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| Belanja Tidak Langsung | Rp.2.810.455.984,00 | 44,76% |
| Belanja Langsung | Rp.3.468.725.405,00 | 55,24% |
| Jumlah | Rp.6.279.181.389,00 | 100% |

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola Bappeda Kulon Progo mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan seiring dengan berjalannya pelaksanaan program/kegiatan terdapat optimalisasi serta kebutuhan yang mendesak, terdapat penambahan anggaran baik melalui kegiatan yang sudah ada maupun penambahan kegiatan baru.

Anggaran belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

| No. | Sasaran | Anggaran | Presentase |
|-----|---|----------------------|------------|
| 1 | Meningkatnya kinerja perencanaan | Rp. 2.018.180.730,00 | 58,18% |
| 2 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Rp. 716.944.000,00 | 20,67% |

Tabel 2.7 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola Bappeda Kulon Progo untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2013. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran pertama terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.018.180.730,00.
- b. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran ke-2 terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp. 716.944.000,00.
- c. Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD sebesar Rp.733.600.675,00.

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2013

| No. | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|---|---|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya kinerja perencanaan | Capaian kinerja program | 81,83% | 81,83% | 100% |
| 2 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 78,69% | 78,69% | 100% |

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2013 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kinerja Perencanaan

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama adalah Capaian kinerja program.

Tabel 3.2
Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2013

| Indikator | Capaian 2012 | 2013 | | | Target akhir renstra (2016) | Capaian s/d 2013 terhadap 2016 |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| Capaian kinerja program | 83,70% | 81,83% | 81,83% | 100% | 90,00% | 90,92% |

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja program} = \frac{\text{jumlah persentase capaian program kabupaten}}{\text{jumlah program}}$$

Realisasi capaian kinerja program mengalami penurunan sebesar 1,87% dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu:

- Belum optimalnya hasil perencanaan
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan
- Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan *up to date*
- Data belum bisa diakses secara mudah oleh *stakeholders*
- Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

- Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD yang diampu.
- Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan di semua bidang/sector.
- Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kulon Progo dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang terkait dengan data/informasi yang akan dipublikasikan.

- Mengoptimalkan IPTEK melalui penyebaran informasi terutama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator mencapai 90,92% dengan deviasi sebesar 8,17%.



Gambar 3.1
Halaman depan website Bappeda Kulon Progo

III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-2 adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

Tabel 3.3
Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2013

| Indikator | Capaian 2012 | 2013 | | | Target akhir renstra (2016) | Capaian s/d 2013 terhadap 2016 |
|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 70,43% | 78,69% | 78,69% | 100% | 81,07% | 97,06% |

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

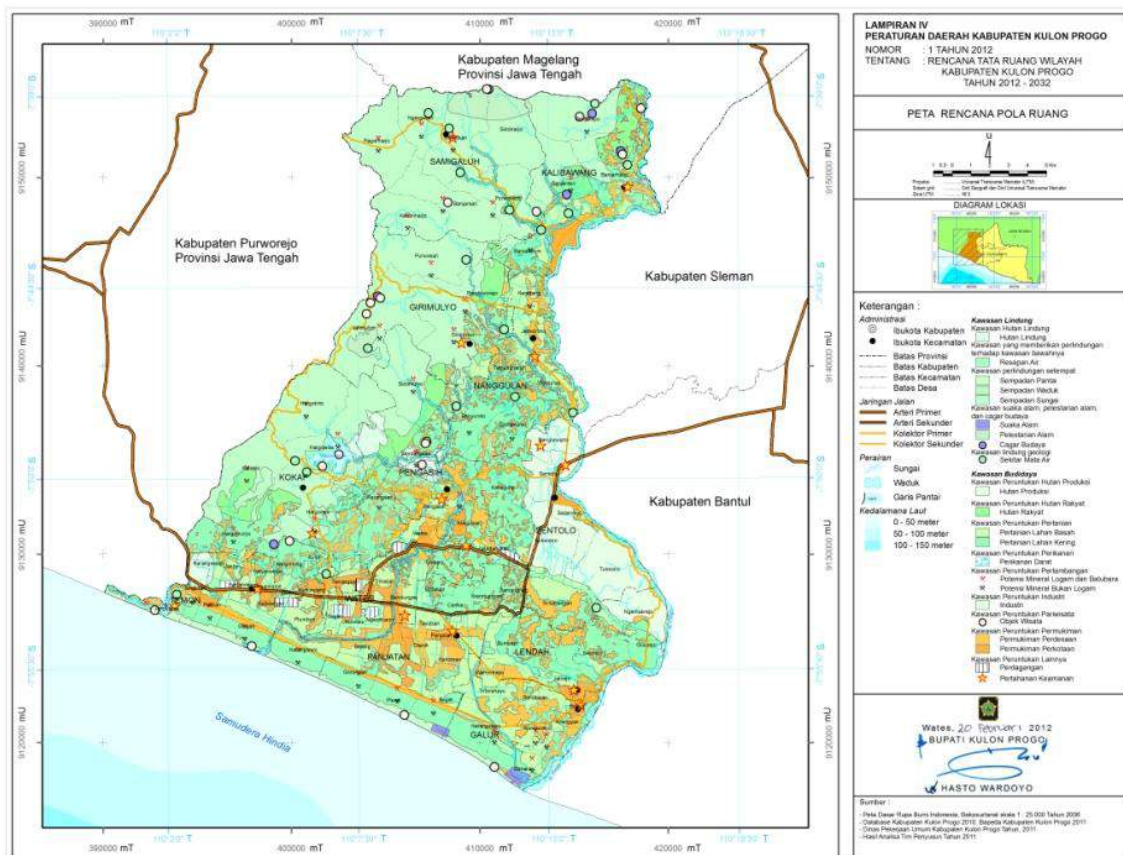
$$\text{Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang} = \frac{\text{luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$$

Realisasi capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan sebesar 8,26% dibandingkan dengan tahun 2012. Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator mencapai 97,06% dengan deviasi sebesar 2,38%. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

- Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
- Belum tegasnya penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

- Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang.
- Melengkapi perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, seperti peraturan zonasi dan ketentuan insentif dan disinsentif.
- Melakukan penegakan aturan tata ruang.



Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo

III.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 83,22% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 83,01%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 83,77%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (88,18%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran ke-2 (81,17%).

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2013

| No. | Sasaran | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya kinerja perencanaan | Rp. 2.018.180.730,00 | Rp.1.638.111.626,00 | 81,17% |
| 2 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Rp. 716.944.000,00 | Rp.632.192.025,00 | 88,18% |
| Jumlah | | Rp.2.735.124.730,00 | Rp.2.270.303.651,00 | 83,01% |
| Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD | | Rp.733.600.675,00 | Rp.614.502.268,00 | 83,77% |
| Total belanja langsung | | Rp.3.468.725.405,00 | Rp.2.886.742.069,00 | 83,22% |

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah Daerah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LAKIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Bappeda secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

